



RENCANA KERJA (RENJA)

TAHUN ANGGARAN 2015



DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Jln. Sutan Syahrir No. 41 Pangkalan Bun 74112 Telp. (0532) 21412, 25137 Fax. (0532) 25233
Rencana Kerja Tahun 2015 Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Ktw. Barat

**E-mail : dpkd.kotawaringinbarat@gmail.com Website : www.dpkd.kotawaringinbaratkab.go.id
Standar Mutu Manajemen ISO 9001:2008 TUV Rheinland No. 01.100.106322**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, dimana kami telah dapat menyelesaikan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA SKPD) Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2015.

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2015 ini memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi pokok, berpedoman pada Rencana Strategis Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012 – 2016. Selanjutnya Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2015 ini menjadi landasan atau pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun anggaran 2015. Dalam RENJA ini juga tergambar rencana kerja dan capaian kinerja untuk Tahun 2014. Rencana Kerja merupakan sasaran yang ingin dicapai selain diarahkan bagi pemenuhan target yang ditetapkan dalam Tahun 2014, mencakup pula pelaksanaan kegiatan tugas pokok dan fungsi yang sebelumnya tidak direncanakan. Analisis dilakukan secara mendalam pada setiap sasaran untuk memperlihatkan kinerja sesungguhnya, dan mengidentifikasi kendala yang dihadapi.

Akhirnya, Kami berharap agar Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA SKPD) Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat ini dapat menjadi sumber informasi yang bermanfaat bagi stakeholders dan masyarakat pada umumnya untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja secara berkelanjutan.

Pangkalan Bun, Agustus 2014

**KEPALA DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

**Drs. H. M. FAUZI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19600103 199003 1 004**

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Landasan Hukum	4
C. Maksud dan Tujuan	5
D. Sistematika Penulisan	6
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU	9
A. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD	9
B. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD	13
C. Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD	14
D. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	16
E. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan	17
BAB III TUJUAN SASARAN KEBIJAKAN PROGRAM DAN KEGIATAN	18
A. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	18
B. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD	18
BAB IV PROGRAM DAN KEGIATAN	22
BAB V PENUTUP	23
LAMPIRAN - LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2015 Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk periode 1 (satu) Tahun yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah (dalam hal ini yang dimaksud adalah Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD) Kabupaten Kotawaringin Barat) maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat (contohnya Partisipasi masyarakat untuk aktif membayar pajak).

Sebagai dokumen rencana tahunan satuan kerja perangkat daerah, Renja Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Renja SKPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
2. Renja merupakan acuan SKPD untuk memasukan program kegiatan dalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2015
3. Renja SKPD merupakan salah satu instrument untuk evaluasi pelaksanaan program / kegiatan instansi untuk mengetahui sejauh

mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun 2015.

Mengingat arti strategis dokumen Renja SKPD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan Pemerintah Daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja SKPD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Sesuai amanat tersebut maka Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun 2014 ini menyusun Rencana Kerja Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2015.

Rencana Kerja Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2015, merupakan rencana pembangunan tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan Visi Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2012 – 2016 seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012 – 2016 yaitu :

“Menjadi Pengelolaan Keuangan Daerah yang Amanah dan Akuntabel untuk mewujudkan Kabupaten Kotawaringin Barat yang Sejahtera, Berkeadilan dan Jaya”

Untuk mewujudkan visi tersebut diatas, diperlukan tindakan nyata dalam bentuk misi. Sesuai dengan peran Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat, misi Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012 – 2016 adalah sebagai berikut :

- 1. Mengembangkan, membangun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah yang sehat, hati-hati dan akuntabel.***
- 2. Membangun dan mengembangkan sistem pengelolaan keuangan daerah yang modern dan terintegrasi.***
- 3. Membangun dan mengembangkan Sumber Daya Manusia yang akuntabel, responsible dan amanah.***

Rencana Kerja (Renja) DPDK Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2015, akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan DPDK Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2015 yang telah ditetapkan Prioritas Pembangunan Daerah, yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah.

B. LANDASAN HUKUM

Sebagai dasar hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. Undang-Undang No.25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
3. Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
4. Undang-Undang No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah

5. Peraturan Pemerintah No.58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
6. Peraturan Pemerintah No.65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Penyusunan Standar Pelayanan Minimal
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.06 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal
9. SEB Menteri Negara Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Kepala Bapennas dan Menteri Dalam Negeri No.0008/M.PPN/01/2007/050/264A/SJ tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Musrenbang Tahun 2007
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2008 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 3)
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Rencana Kerja Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2015 adalah sebagai produk perencanaan pembangunan daerah yang menjadi acuan bagi dinas dan pelaksanaan tugas pelayanan publik sebagai tindak lanjut dari perumusan kebijakan strategis dalam rangka peningkatan pendapatan daerah. Serta untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai arah kebijakan, tujuan, strategi, dan kebutuhan dinas yang telah dijabarkan lebih lanjut dari Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat sehingga perencanaan semakin terintegrasi dan komprehensif serta mampu mendorong komitmen dinas dalam mencapai target realisasi yang telah ditetapkan.

Sedangkan tujuan Rencana Kerja Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2015 adalah:

1. Menjabarkan Rencana Strategis Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2012 – 2016 dalam rencana program / kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai Visi dan Misi.
2. Menjadi pedoman bagi Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat dalam melaksanakan seluruh kegiatan Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun anggaran 2015.
3. Menjadi acuan bagi Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) tahun anggaran 2015 dalam rangka penyelenggaraan program dan kegiatan.
4. Menciptakan kepastian dan sinergisitas perencanaan dan program kegiatan dalam keterpaduan sumber pendanaan.
5. Mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan alokasi sumber daya serta produktifitas dalam rangka peningkatan kinerja Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

D. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I PENDAHULUAN, pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja SKPD yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan, sehingga substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD**, memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang

seharusnya pada waktu penyusunan Renja SKPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya.

- 2.2. **Analisis Kinerja Pelayanan SKPD**, berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.6 tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007. Jika indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan

- 2.3. **Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD**, berisikan uraian mengenai : Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan SKPD, Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD, Dampaknya terhadap capaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs (Millenium Development Goals), Tantangan dan peluang serta Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

- 2.4. **Review terhadap Rancangan Awal RKPD**, berisikan uraian mengenai proses membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan.

- 2.5. **Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**, berisikan mengenai kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan yang langsung ditujukan kepada SKPD maupun

berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD dari penelitian lapangan dan pengamatan musrenbang kabupaten (bila sudah dilakukan).

BAB III TUJUAN, SASARAN, KEBIJAKAN PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap kebijakan Nasional, telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana maksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD, perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD

BAB IV PROGRAM DAN KEGIATAN,berisikan penjelasan mengenai : faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, rekapitulasi program dan kegiatan serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya

BAB V PENUTUP, menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat

Evaluasi dilaksanakan untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahun lalu pada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat, maka perlu adanya gambaran mengenai kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan sampai dengan tahun berjalan.

Dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel Realisasi Capaian Pelaksanaan Program dan kegiatan tahun 2013 :

Program / Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4
- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.754.570.300,00	1.639.487.959	93,44
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000,00	976.500,00	97,65
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	184.888.000,00	153.941.170,00	83,26
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	5.100.000,00	2.809.700,00	55,09
Penyediaan jasa administrasi keuangan	234.613.500,00	213.579.500,00	91,03
Penyediaan jasa kebersihan kantor	86.200.000,00	84.774.800,00	98,34
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	56.475.000,00	49.445.000,00	87,55
Penyediaan alat tulis kantor	133.700.000,00	132.219.670,00	98,89
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	141.650.000,00	139.218.600,00	98,28
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	9.999.500,00	9.978.500,00	99,78
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	438.550.000,00	433.305.000,00	98,8
Penyediaan peralatan rumah tangga	1.600.000,00	1.550.000,00	96,87
Penyediaan makanan dan minuman	66.240.000,00	41.522.500,00	62,68

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	325.000.000,00	324.656.718,00	99,89
Peningkatan Mutu Pelayanan Publik	69.554.300,00	51.510.301,00	74,05
- Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.075.093.700,00	951.440.160,00	88,49
Pembangunan gedung kantor	495.493.700,00	487.283.929,00	98,34
Pengadaan kendaraan dinas/operasional	53.700.000,00	49.792.500,00	92,72
Pengadaan perlengkapan gedung kantor	109.950.000,00	107.704.585,00	97,95
Pengadaan peralatan gedung kantor	141.200.000,00	137.500.000,00	97,37
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	9.000.000,00	8.984.800,00	99,83
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	253.700.000,00	150.148.346,00	59,18
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	12.050.000,00	10.026.000,00	83,2
- Peningkatan Disiplin Aparatur	67.900.000,00	67.633.500,00	99,6
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	37.900.000,00	37.686.000,00	99,43
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	30.000.000,00	29.947.500,00	99,82
- Program fasilitas pindah/purna tugas PNS	7.500.000,00	7.500.000,00	100,00
Pemulangan pegawai yang pensiun	7.500.000,00	7.500.000,00	100,00

- Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	140.000.000,00	130.520.302,00	93,22
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	140.000.000,00	130.520.302,00	93,22
- Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan	30.000.000,00	27.860.510,00	92,86
Penyusunan laporan keuangan semesteran	30.000.000,00	27.860.501,00	92,86
- Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	1.920.369.000,00	1.683.974.587,00	87,69
Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD	192.000.000,00	136.143.420,00	70,9
Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran APBD	50.000.000,00	33.531.630,00	67,06
Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD	116.000.000,00	108.204.165,00	93,27
Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD	45.000.000,00	37.586.450,00	83,52
Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	140.000.000,00	123.926.550,00	88,51
Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	15.000.000,00	14.960.000,00	99,73
Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah	38.000.000,00	11.665.948,00	30,69
Bimbingan teknis implementasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah	66.982.000,00	30.645.000,00	45,75
Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah	1.117.387.000,00	1.047.831.424,00	93,77
Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Informasi Keuangan Daerah	140.000.000,00	139.480.000,00	99,62

Total	Rp 4.995.433.000,00	Rp 4.508.417.009,00	90,25
--------------	----------------------------	----------------------------	--------------

Secara umum capaian kinerja Dinas Pengelolaan keuangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2013 sudah terlaksana dengan baik.

Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada tabel rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja SKPD sampai dengan tahun 2014 berikut (terlampir).

Sedangkan untuk tahun berjalan yakni anggaran tahun 2014 dengan usulan sebesar **Rp. 4.961.380.000,-** diharapkan keberhasilan kinerja mencapai 100% baik itu secara realisasi fisik maupun realisasi keuangan.

Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2013 serta perkiraan capaian program dan kegiatan tahun 2014, dapat dikemukakan permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yaitu Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat dituntut untuk tercapainya pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan amanah, namun dalam pelaksanaannya kurangnya sumber daya manusia (SDM) yang siap dan handal dalam mencapai keinginan tersebut serta masih kurangnya koordinasi antar bidang yang menyebabkan adanya target yang tidak dapat dipenuhi secara maksimal.

Dalam rangka mewujudkan hal tersebut ada beberapa langkah strategi yang akan diambil antara lain diikuti sertakan Bimbingan Teknis mengenai pengelolaan keuangan daerah, memberikan tugas belajar untuk meningkatkan potensi sumber daya manusia (SDM) yang sudah ada dan penambahan pegawai sesuai dengan kebutuhan formasi pada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

5.1. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Kinerja pelayanan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

2.3. ISU – ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD

1. Tugas Pokok

Tugas Pokok Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat adalah

Membantu Bupati dalam merumuskan kebijakan dibidang keuangan daerah, melaksanakan pemungutan pajak daerah dan melakukan pembinaan administrasi keuangan dan kekayaan daerah

2. Kewenangan

- a. Merumuskan kebijakan dibidang keuangan daerah
- b. Melakukan pembinaan administrasi keuangan daerah
- c. Melakukan pembinaan administrasi kekayaan daerah
- d. Melaksanakan pemungutan pajak daerah
- e. Melaksanakan pemungutan pajak bumi dan bangunan sektor perkotaan dan pedesaan
- f. Melaksanakan kegiatan dan keserasian yang berhubungan dengan peningkatan pendapatan daerah
- g. Melaksanakan pendataan dan pengembangan sumber-sumber pendapatan daerah
- h. Melaksanakan kegiatan pelatihan teknis bidang keuangan daerah
- i. Melaksanakan pembinaan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pemungutan pendapatan daerah sesuai dengan ketentuan Perundang – Undangan
- j. Pembinaan administrasi, organisasi dan tata laksana serta memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh unit kerjadan fungsi lembaga tersebut

3. Fungsi

- a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah
- b. Menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD.
- c. Mengkoordinasikan penyusunan RAPBD dan rancangan perubahan APBD.
- d. Melaksanakan pemungutan pajak daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah.
- e. Menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggung jawaban pelaksanaan APBD.
- f. Mengesahkan DPA – SKPD / DPPA SKPD
- g. Melakukan pengendalian pelaksanaan APBD.
- h. Memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan sistem pengeluaran kas daerah.
- i. Menetapkan surat penyediaan dana (SPD)
- j. Menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah.
- k. Melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah.
- l. Menyajikan informasi keuangan daerah.
- m. Melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah.
- n. Melaksanakan tugas lain berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati.

4. Isu – isu Strategis

- a. Struktur organisasi belum sesuai dengan semangat Undang-Undang di bidang keuangan.
- b. Penempatan personil belum sesuai dengan ketentuan organisasi.
- c. Pendapatan daerah belum optimal.
- d. Penyerapan anggaran tidak sesuai tahapan.
- e. Pertanggungjawaban keuangan masih lemah.

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional sebagaimana diatur dalam Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

RPJMD merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahun. Dalam penyusunannya, RPJMD dilakukan secara komprehensif, terpadu dan menyeluruh, serta mengedepankan keterlibatan masyarakat secara partisipatif dengan mempertimbangkan dan menampung aspirasi pemangku kepentingan.

Tentunya masih terdapat berbagai hal yang masih perlu ditindaklanjuti, disamping adanya hal – hal baru yang berkembang selama periode berikutnya. Untuk itulah Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat perlu merumuskan rumusan strategi, arah kebijakan dan program pembangunan yang terarah efektif, efisien sehingga mendorong terwujudnya Visi, Misi, tujuan dan Sasaran pembangunan yang telah ditetapkan.

Rencana Kerja (Renja) merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam dokumen Rencana Kerja (Renja) memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai berikut indikator kinerja sasaran, dan rencana pencapaiannya yang merupakan representasi tugas pokok dan fungsi Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat. Disamping itu, dokumen rencana kerja (Renja) juga memuat informasi tentang program, kegiatan, serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Melalui dokumen ini akan diketahui keterkaitan antara kegiatan, sasaran, kebijakan, program, serta kegiatan – kegiatan yang dilaksanakan.

2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Rencana program merupakan cara untuk mendukung arah kebijakan yang telah ditetapkan. Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat dalam mendukung arah kebijakan telah menetapkan program utama untuk program lima tahun ke depan. Adapun rencana program yang dimaksud yang sesuai dalam RPJMD adalah “ **Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah**”. Namun dalam pelaksanaannya didukung pula dengan beberapa program sesuai dengan Permendagri No.59 Tahun 2007 diantaranya :

1. Program Pelayanan administrasi perkantoran
2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
3. Program peningkatan disiplin aparatur
4. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
5. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
6. Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah

Kegiatan merupakan bagian dari program yang dilaksanakan dalam unit kerja, dalam hal ini Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat mempunyai beberapa kegiatan yang dilakukan dalam menunjang program yang telah ditetapkan yaitu : (dapat dilihat pada tabel berikut)

BAB III

TUJUAN, SASARAN, KEBIJAKAN PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Kebijakan merupakan suatu keputusan yang diambil untuk menggambarkan prioritas pelaksanaan tugas dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki serta

kendala-kendala yang ada dalam kurun waktu tertentu agar pencapaian tujuan dapat sesuai dengan rencana secara efisien dan efektif yang sesuai dengan misi yang diemban oleh organisasi dalam rangka mewujudkan visi yang telah dirumuskan dan dapat memenuhi standar penyelenggaraan good governance dan akuntabilitas publik.

Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk mencapai tujuan dalam menentukan bentuk konfigurasi Program dan Kegiatan selama periode 2012 – 2016 atau merupakan ketentuan – ketentuan yang disepakati bersama untuk dijadikan pedoman, pegangan dan petunjuk dalam pelaksanaan program atau kegiatan agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran, tujuan, visi dan misi suatu organisasi.

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor – faktor kunci keberhasilan (*Critical Success Factor*) yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya Membantu Bupati dalam merumuskan kebijakan dibidang keuangan daerah, melaksanakan pemungutan pajak daerah dan melakukan pembinaan administrasi keuangan dan kekayaan daerah.

Untuk itu, disusun visi dan misi Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah yang akan dicapai melalui pencapaian tujuan dan pelaksanaan kegiatan utama dan

kegiatan pendukungnya. Dalam hal ini, visi dan misi yang disusun harus dikaitkan dengan RPJMD 2012 – 2016.

VISI Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat adalah:

“Menjadi Pengelolaan Keuangan Daerah yang Amanah dan Akuntabel untuk mewujudkan Kabupaten Kotawaringin Barat yang Sejahtera, Berkeadilan dan Jaya”

Untuk mewujudkan Visi Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat 2012-2016, maka disusunlah misi yang menjadi tanggung jawab Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

MISI Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat adalah:

1. Mengembangkan, membangun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah yang sehat, hati-hati dan akuntabel.
2. Membangun dan mengembangkan sistem pengelolaan keuangan daerah yang modern dan terintegrasi.
3. Membangun dan mengembangkan Sumber Daya Manusia yang akuntabel, responsible dan amanah.

Adapun tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja SKPD selama lima tahun.

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi.

Sasaran atau objectives organisasi merupakan tingkat capaian yang diharapkan sesuai tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran merupakan bagian yang integral dalam proses perencanaan strategis organisasi, sehingga harus disusun secara konsisten dengan perumusan visi, misi dan tujuan organisasi. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kaitannya dengan pencapaian kinerja yang diinginkan.

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan, maka sasaran harus menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai. Dengan demikian apabila seluruh sasaran yang akan ditetapkan telah dicapai, maka diharapkan tujuan strategis terkait juga telah tercapai.

Adapun Tujuan dan Sasaran Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1. Tujuan dan Sasaran Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat

Visi	Misi	Uraian	
		Tujuan	Sasaran
(1)	(2)	(3)	(4)
<i>Menjadi Pengelolaan Keuangan Daerah yang</i>	Mengembangkan, membangun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan	- Meningkatkan pendapatan daerah dengan mempertimbangkan rasa	- Pendapatan daerah yang optimal

<i>Amanah dan Akuntabel untuk mewujudkan Kabupaten Kotawaringin Barat yang Sejahtera, Berkeadilan dan Jaya</i>	daerah yang sehat, hati-hati dan akuntabel.	keadilan masyarakat - Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan belanja daerah	- Pelaksanaan belanja daerah yang optimal
	Membangun dan mengembangkan sistem pengelolaan keuangan daerah yang modern dan terintegrasi	- Pengelolaan perbendaharaan daerah yang profesional, akuntabel dengan mengedepankan kepuasan stakeholders atas kinerja perbendaharaan daerah	- Pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien - Pertanggungjawaban yang transparan dan akuntabel
	Membangun dan mengembangkan Sumber Daya Manusia yang akuntabel, responsible dan amanah	- Meningkatkan kualitas pertanggungjawaban keuangan daerah	- Pengelolaan anggaran yang optimal - Pengembangan organisasi yang handal

BAB IV

PROGRAM DAN KEGIATAN

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yaitu Membantu Bupati dalam merumuskan kebijakan dibidang keuangan daerah, melaksanakan pemungutan pajak daerah dan melakukan pembinaan administrasi keuangan dan kekayaan daerah.

Sejalan dengan Visi Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2012 – 2016 yaitu ***“Terwujudnya Kabupaten Kotawaringin Barat yang Sejahtera, Berkeadilan dan Jaya”*** dan sesuai dengan Visi Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012 – 2016 yaitu ***“Menjadi Pengelolaan Keuangan Daerah yang Amanah dan Akuntabel untuk mewujudkan Kabupaten Kotawaringin Barat yang Sejahtera, Berkeadilan dan Jaya”***, maka program dan kegiatan yang dirancang Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2015 dapat dilihat pada tabel berikut (terlampir).

BAB V

P E N U T U P

Apabila tersedia anggaran yang memadai maka semua program kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik dan target yang diinginkan akan tercapai demikian sebaliknya seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan maka program dan kegiatan yang akan dilaksanakan tidak mendapatkan hasil maksimal.

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA SKPD) Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat dibuat untuk periode 1 (satu) tahun, disusun sebagai indikator dalam menentukan arah kebijakan tahunan kinerja program dan kegiatan untuk dilaksanakan dan diselesaikan dalam kurun waktu satu tahun anggaran. Untuk tindak lanjut dalam penyusunan Renja ini selanjutnya kami akan menyusun program kegiatan dan anggaran dalam bentuk Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2015.

Demikian Rencana Kerja (Renja) Tahun 2015 ini dibuat dan diharapkan akan menjadi pedoman semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat sehinggalah seluruh program dan kegiatan akan dapat dicapai secara terukur, terarah, efektif dan efisien.

Pangkalan Bun, Agustus 2014

**KEPALA DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

Drs. H. M. FAUZI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19600103 199003 1 004

**PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN
DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

No	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2012	2013	2014	2015	2012	2013	2014	2015	
1	2	3	4	6	7	8	8	10	10	11	12	13
1	Persentase realisasi pendapatan			99	100	100	105	121,11	97,09	100	105	
2	Persentase realisasi pajak			100	102	102	106	109,07	80,10	102	106	
3	Persentase lain-lain penerimaan daerah			100	100	100	100	170,48	154,74	100	100	
4	Persentase ketepatan penyerapan belanja pegawai (gaji)			99	99	99	99	97,06	79,10	99	99	
5	Persentase penyerapan belanja langsung			95	96	96	99	88,98	90,18	96	99	
6	Persentase ketepatan penyaluran dana transfer			97	97	97	99	84,69	97,26	97	99	

7	Persentase akurasi anggaran kas			90	92	92	97	88	90	92	97	
8	Ketepatan penyediaan dana untuk membiayai pengeluaran			90	92	92	98	90	92	92	98	
9	Persentase realisasi fungsi pelayanan			95	97	97	98	95	97	97	98	
10	Ketersediaan informasi yang handal			100	100	100	100	100	100	100	100	
11	Jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan SKPD			15	10	10	3	14,7	7	10	3	
12	Ketepatan penyampaian LKPD			100	100	100	100	100	100	100	100	
13	Persentase penyerapan DPA SKPD			97	98	98	99	93,77	82,22	98	99	
14	Persentase satuan kerja yang menyampaikan laporan keuangan tepat waktu			95	96	96	99	95	96	96	99	
15	Indek kepuasan pelanggan			95	97	97	98	85	85	97	98	
16	Persentase penyelesaian SOP			97	98	98	100	98	98	98	100	
17	Persentase profil resiko			12	10	7	7	11,5	9,5	7	7	

HASIL KOMPILASI USULAN KEGIATAN FORUM SKPD TAHUN ANGGARAN 2015

SKPD : DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Status Usulan : Disetujui

No	Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Sasaran	Volume	Lokasi	Prioritas	Sumber Pendanaan				Jumlah	Uraian
							APBN	APBD I	APBD II	LAINNYA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	X.XX	UMUM					0	0	3.349.100.000,00	0	3.349.100.000,00	
	X.XX.XX.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					0	0	2.263.100.000,00	0	2.263.100.000,00	
	X.XX.XX.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Surat dinas keluar	50 Lembar	Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat / Kecamatan Arut Selatan		0	0	1.100.000,00	0	1.100.000,00	Penyediaan jasa surat menyurat
	X.XX.XX.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jasa telepon, PDAM, Listrik, Media cetak, Internet dan Extranet	1 Tahun	Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat / Kecamatan Arut Selatan		0	0	385.000.000,00	0	385.000.000,00	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
	X.XX.XX.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Surat - Surat Kendaraan dinas layak jalan	31 Unit	Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat / Kecamatan Arut Selatan		0	0	7.000.000,00	0	7.000.000,00	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
	X.XX.XX.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya keperluan pengelolaan keuangan daerah	100%	Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat / Kecamatan Arut Selatan		0	0	500.000.000,00	0	500.000.000,00	Penyediaan jasa administrasi keuangan

X.XX.XX.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Kebersihan Lingkungan Kantor	12 bulan	Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat / Kecamatan Arut Selatan	0	0	110.000.000,00	0	110.000.000,00	Penyediaan jasa kebersihan kantor
X.XX.XX.01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Kelancaran pelaksanaan tugas	100%	Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat / Kecamatan Arut Selatan	0	0	100.000.000,00	0	100.000.000,00	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
X.XX.XX.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	ATK tersedia	100%	Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat / Kecamatan Arut Selatan	0	0	150.000.000,00	0	150.000.000,00	Penyediaan alat tulis kantor
X.XX.XX.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	kop surat dan barang cetakan untuk keperluan adm.kantor, serta untuk penggandaan keperluan adm.kantor	100%	Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat / Kecamatan Arut Selatan	0	0	210.000.000,00	0	210.000.000,00	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
X.XX.XX.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Komponen listrik pengganti	1 Tahun	Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat / Kecamatan Arut Selatan	0	0	15.000.000,00	0	15.000.000,00	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
X.XX.XX.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Mouse, wifi usb, printer, notebook, harddisk eksternal, radio wifi, flashdisk	100%	Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat / Kecamatan Arut Selatan	0	0	300.000.000,00	0	300.000.000,00	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

X.XX.XX.01.14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Kelancaran pelaksanaan tugas	100%	Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat / Kecamatan Arut Selatan		0	0	5.000.000,00	0	5.000.000,00	Penyediaan peralatan rumah tangga
X.XX.XX.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Makanan dan minuman rapat dan tamu	1 Tahun	Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat / Kecamatan Arut Selatan		0	0	80.000.000,00	0	80.000.000,00	Penyediaan makanan dan minuman
X.XX.XX.01.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	1 Tahun	Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat / Kecamatan Arut Selatan		0	0	350.000.000,00	0	350.000.000,00	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
X.XX.XX.01.21	Peningkatan Mutu Pelayanan Publik	Kegiatan Motivasi Pegawai	13 Tupoksi	Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat / Kecamatan Arut Selatan		0	0	50.000.000,00	0	50.000.000,00	Peningkatan Mutu Pelayanan Publik
X.XX.XX.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur					0	0	835.000.000,00	0	835.000.000,00	
X.XX.XX.02.03	Pembangunan gedung kantor	Pembuatan Partisi Ruang Antar Bidang (Lantai II), Halaman Parkir,	2 Paket Kegiatan	Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat / Kecamatan Arut Selatan		0	0	104.000.000,00	0	104.000.000,00	Pembangunan gedung kantor

X.XX.XX.02.05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Kendaraan Dinas roda 4 operasional dan Kendaraan Dinas Roda 2 operasional	3 Unit	Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat / Kecamatan Arut Selatan		0	0	355.000.000,00	0	355.000.000,00	Pengadaan kendaraan dinas/operasional
X.XX.XX.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor					0	0	0	0	0	
X.XX.XX.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Pengadaan Blower Untuk Ruang Arsip	5 Unit	Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat / Kecamatan Arut Selatan		0	0	5.000.000,00	0	5.000.000,00	Pengadaan peralatan gedung kantor
X.XX.XX.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Pemeliharaan Gedung Kantor	100%	Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat / Kecamatan Arut Selatan		0	0	9.000.000,00	0	9.000.000,00	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
X.XX.XX.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kendaraan dinas roda 4 dan 2 yang dipelihara	31 Unit	Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat / Kecamatan Arut Selatan		0	0	340.000.000,00	0	340.000.000,00	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
X.XX.XX.02.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor					0	0	0	0	0	
X.XX.XX.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	AC split dan standing yang dipelihara serta sound system & TV yang dipelihara	1 Tahun	Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat / Kecamatan Arut Selatan		0	0	22.000.000,00	0	22.000.000,00	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
X.XX.XX.03	Program peningkatan disiplin aparatur					0	0	71.000.000,00	0	71.000.000,00	

	X.XX.XX.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Pakaian pertahanan sipil (Hansip) dan Satpam	85 Stel	Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat / Kecamatan Arut Selatan		0	0	36.000.000,00	0	36.000.000,00	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
	X.XX.XX.03.05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Pakaian Adat dan Batik	85 Stel	Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat / Kecamatan Arut Selatan		0	0	35.000.000,00	0	35.000.000,00	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
	X.XX.XX.05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur					0	0	140.000.000,00	0	140.000.000,00	
	X.XX.XX.05.03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Aparatur mengikuti BimTek	1 Tahun	Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat / Kecamatan Arut Selatan		0	0	140.000.000,00	0	140.000.000,00	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
	X.XX.XX.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan					0	0	40.000.000,00	0	40.000.000,00	
	X.XX.XX.06.02	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Laporan Semesteran	1 Laporan Semester	Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat / Kecamatan Arut Selatan		0	0	40.000.000,00	0	40.000.000,00	Penyusunan laporan keuangan semesteran

2.	1.20	OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN					0	0	1.612.280.000,00	0	1.612.280.000,00	
	1.20.XX.17	Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah					0	0	1.612.280.000,00	0	1.612.280.000,00	
	1.20.XX.17.06	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD	Dokumen KUA PPAS, Dokumen Perda tentang APBD	285 Buku	Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat / Kecamatan Arut Selatan		0	0	200.000.000,00	0	200.000.000,00	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD
	1.20.XX.17.07	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran APBD	Dokumen Penjabaran APBD, termasuk draf Perbup APBD, nota keuangan, RKPD, Renstra, dokumen risalah sidang	500 Buku	Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat / Kecamatan Arut Selatan		0	0	55.000.000,00	0	55.000.000,00	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran APBD
	1.20.XX.17.08	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD	Dokumen Perda tentang Perubahan APBD, KUA dan PPAS Perubahan APBD	150 buku	Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat / Kecamatan Arut Selatan		0	0	130.000.000,00	0	130.000.000,00	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD
	1.20.XX.17.09	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD	Dokumen Peraturan KDH tentang Penjabaran perubahan APBD	450 buku	Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat / Kecamatan Arut Selatan		0	0	50.000.000,00	0	50.000.000,00	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD

1.20.XX.17.10	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Dokumen Perda tentang pertanggungjawaban APBD	334 buku	Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat / Kecamatan Arut Selatan		0	0	120.000.000,00	0	120.000.000,00	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
1.20.XX.17.11	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Dokumen perbup pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	300 buku	Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat / Kecamatan Arut Selatan		0	0	22.280.000,00	0	22.280.000,00	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
1.20.XX.17.14	Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah	Rakor pengelolaan keuangan daerah	100%	Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat / Kecamatan Arut Selatan		0	0	100.000.000,00	0	100.000.000,00	Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah
1.20.XX.17.15	Bimbingan teknis implementasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah	Peserta diklat bidang pengelolaan keuangan daerah	200 Orang	Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat / Kecamatan Arut Selatan		0	0	100.000.000,00	0	100.000.000,00	Bimbingan teknis implementasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah
1.20.XX.17.19	Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah	Peningkatan penerimaan daerah	100%	Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat / Kecamatan Arut Selatan		0	0	635.000.000,00	0	635.000.000,00	Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah

1.20.XX.17.25	Pemeliharaan dan Pengembangan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah	Pengembangan Integrasi SIMBADA-SIMKADA, SIMKADA-Extranet (Basis PHP), SIM Gaji, Aplikasi Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua, Aplikasi Barcode	100%	Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat / Kecamatan Arut Selatan		0	0	200.000.000,00	0	200.000.000,00	Pemeliharaan dan Pengembangan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah
Jumlah						0	0	4.961.380.000,00	0	4.961.380.000,00	